



LPT

Laporan Penundaan Transaksi



Januari 2023

PEMENUHAN ASPEK



Aspek penundaan transaksi yang terbanyak adalah **Aspek Formil Terpenuhi, Aspek Materil Tidak Terpenuhi**

PIHAK PELAPOR



JENIS TERLAPOR



NOMINAL TRANSAKSI



WILAYAH



JENIS TRANSAKSI



ALASAN PENUNDAAN



Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung HK yang berasal dari hasil tindak pidana

Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu



● Pelaporan LPT dimulai sejak Januari 2013

Penerimaan Laporan Penundaan Transaksi pada Januari 2023

47 Laporan

Pelaporan LPT bulan ini

▲ 95,83%

Dibandingkan bulan Desember 2022 (m-to-m)

Pelaporan LPT bulan ini

▼ -70,99%

Dibandingkan bulan Desember 2021 (y-on-y)

Grafik 15. Jumlah LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir



Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	178	1.295	162	96	143	89	80	75	48	150	172	216	41	23	45
Bank Umum	178	1.294	162	96	143	89	80	75	48	150	171	216	41	23	45
Bank Asing	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bank Milik Negara	23	44	22	1	7	3	1	1	0	2	2	2	3	0	4
Bank Pembangunan Daerah	8	16	8	0	0	1	1	0	2	0	1	1	2	0	2
Bank Swasta	141	1.234	132	95	136	85	78	74	46	148	168	213	36	23	39
Bank Perkreditan Rakyat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Non Bank	18	9	0	0	2	2	0	1	0	0	2	0	1	1	2
Total	196	1.304	162	96	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47



UU No. 8 Tahun 2010
Pasal (26) Ayat (1)

1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Tabel 34. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	6	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	1
Di Bidang Kehutanan	5	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	8	25	-	2	1	1	1	-	10	-	2	1	5	2	-
Di Bidang Pasar Modal	2	10	1	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perasuransian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	12	11	-	-	1	5	2	1	-	-	-	1	1	-	-
Di Bidang Perpajakan	148	149	6	7	12	35	17	27	15	12	3	5	4	6	11
Kepabeanan	3	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	1
Korupsi	75	219	5	12	20	15	17	36	13	16	22	17	22	24	19
Narkotika	54	81	-	2	11	13	-	12	3	11	5	4	10	10	2
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
Penggelapan	6	36	2	1	1	1	2	4	5	9	2	2	2	5	1
Penipuan	106	132	4	5	15	21	5	20	13	8	8	6	9	18	3
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
Perdagangan Orang	5	7	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1
Perdagangan Senjata Gelap	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Perjudian	7	62	1	-	2	-	-	-	-	4	34	11	10	-	-
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	106	94	5	6	18	9	2	11	7	5	2	5	3	21	6
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	4	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	19	13	-	-	3	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak teridentifikasi	128	22	-	-	-	1	-	1	8	5	1	2	2	2	-
Aset Tracing	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	707	895	25	41	88	113	50	118	75	71	83	58	75	98	47

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :

No. Panggil :



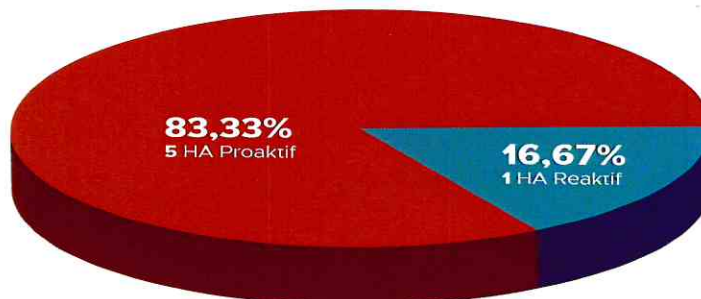
Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	360	494	13	22	48	58	16	56	40	40	62	31	41	67	17
Kejaksaan	83	96	5	5	11	5	6	16	8	7	7	8	6	12	9
KPK	57	82	-	4	6	7	6	12	6	8	8	8	12	5	6
Ditjen Pajak	150	152	6	7	12	36	20	27	15	12	3	5	4	5	11
Ditjen Bea dan Cukai	16	17	-	-	3	2	2	4	1	-	-	2	2	1	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	28	-	2	8	3	-	1	1	2	1	2	4	4	2
Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kementerian Lainnya	8	24	-	1	-	1	-	2	4	2	2	2	6	4	-
Total	706	895	25	41	88	113	50	118	75	71	83	58	75	98	47

Tabel 33. Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme

Hasil Analisis	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	78	59	3	3	13	8	1	5	4	-	2	5	3	12	5
Inquiry	28	35	2	3	5	1	1	6	3	5	-	-	-	9	1
Total	106	94	5	6	18	9	2	11	7	5	2	5	3	21	6

Grafik 17. Persentase Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme Tahun 2023 (Januari 2023)



Tabel 26. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	62	19	2	-	5	1	-	-	2	3	2	2	-	2	2
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	130	1.232	158	96	139	90	77	74	44	114	170	214	36	20	42
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	2	52	2	-	1	-	3	1	2	33	2	-	6	2	1
Total	196	1.304	162	96	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47

Tabel 27. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda

Kategori Nominal Transaksi	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	149	1.284	160	96	140	90	80	75	46	147	172	214	42	22	8
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	27	11	2	-	3	1	-	1	-	2	1	-	-	1	3
Diatas Rp1 Milyar	20	9	-	-	2	-	-	-	2	1	1	2	-	1	1
Tidak Terisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Total	196	1.304	162	96	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47

Tabel 28. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda

Alasan Penundaan Transaksi	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking (Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/ Mobile Banking, dan sebagainya)	37	13	1	2	1	3	-	1	1	1	-	1	-	2	9
Tarik/Setor Tunai	83	29	4	2	5	3	1	-	4	2	5	1	1	1	-
Polis Asuransi	10	6	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
Remittance	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	24	41	21	-	5	1	-	1	-	6	1	-	4	1	2
Tidak Terisi	38	1.214	136	92	131	83	79	74	43	141	167	213	36	19	34
Total	196	1.304	162	96	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47

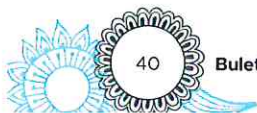


Tabel 29. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

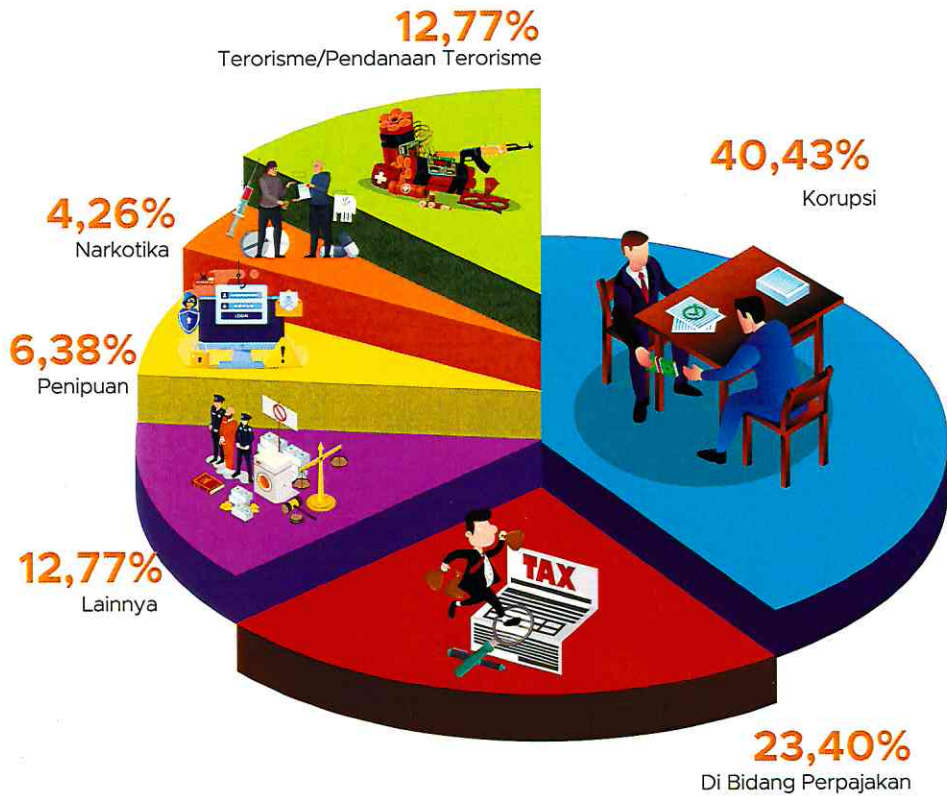
Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	160	1.294	161	95	144	90	80	76	46	150	174	215	39	24	45
Pegawai Swasta	21	151	24	21	25	11	5	2	3	11	21	20	5	3	9
Pengusaha/ Wiraswasta	88	250	34	19	36	12	12	12	7	19	37	49	9	4	6
Pedagang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS termasuk pensiunan	6	68	19	2	18	3	4	5	6	5	2	3	1	-	2
Ibu Rumah Tangga	12	124	11	6	18	6	3	5	4	12	28	22	5	4	5
Professional dan Konsultan	1	16	1	1	1	-	1	-	1	5	-	3	1	2	2
PEPs	-	8	2	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Buruh	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	-
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Pelajar/Mahasiswa	1	91	10	6	5	4	5	8	-	6	11	31	2	3	5
Pengajar/Dosen	-	8	-	2	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-
Lain-Lain	26	567	60	38	39	53	50	43	25	89	66	82	15	7	12
Pegawai BUMN	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Pegawai Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Petani dan Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Korporasi	36	10	1	1	1	1	-	-	2	-	-	1	3	-	2
Total	196	1.304	162	96	145	91	80	76	48	150	174	216	42	24	47

Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

Alasan Penundaan Transaksi	2021	2022	2022												2023
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	8	8	5	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
Pertimbangan (1) dan (3)	54	50	32	-	-	-	-	-	12	-	-	-	5	1	-
Pertimbangan (2) dan (3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	37	25	8	-	-	2	-	2	1	3	4	3	-	2	3
Pertimbangan (2) saja	23	27	2	1	9	3	1	-	3	5	-	-	1	2	1
Pertimbangan (3) saja	40	13	7	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	15	1.162	104	91	130	86	78	72	31	141	165	212	33	19	37
Total	178	1.285	158	94	142	91	79	75	48	150	170	215	39	24	43



Grafik 16. Persentase Jumlah HA berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2023 (Januari 2023)



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2021	2022	2022**)												2023	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
PROAKTIF																
Hasil Analisis	269	376	9	12	40	43	21	48	42	22	43	21	34	41	19	
INQUIRY																
Hasil Analisis	446	519	16	29	48	70	29	70	33	49	40	37	41	57	28	
Total HA	715	895	25	41	88	113	50	118	75	71	83	58	75	98	19	

Catatan:

Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada Stakeholders



**UU No. 8
Tahun 2010**

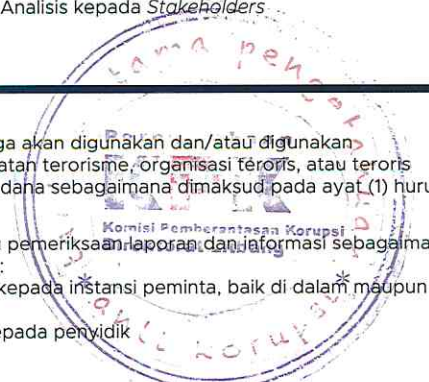
Pasal (2) ayat (2)

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik





HA

HASIL ANALISIS

Januari
2023



Mayoritas pihak
terlapor adalah

**Perorangan
(88%)**



Mayoritas locus (tempat
kejadian) adalah **DKI
Jakarta (16%)**



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPAATK pada Januari 2023

47 HA

Penyampaian HA bulan ini

52,04%

Dibandingkan bulan Desember 2022 (m-to-m)

Penyampaian HA bulan ini

88,00%

Dibandingkan bulan Januari 2022 (y-on-y)